



**:: PELANGGARAN IMB DI KOTA YOGYAKARTA**

## Pengawasan dan Penindakan Perda Sangat Longgar

**YOGYAKARTA** - Polemik pelanggaran perizinan di Kota Yogyakarta kembali mengemuka. Salah satu kasus terbaru yang menyita perhatian, yaitu pembangunan pagar tembok di Kampung Penumping, Go-

beban talud yang kemudian longsor saat hujan deras. Akibatnya, sekitar 30 warga terpaksa mengungsi karena rumahnya terdampak talud longsor.

"Hasil evaluasi soal mekanisme perizinan dan tata ruang

**Dari Hal 9**

Menurut dia, proses pengawasan oleh Satpol PP dinilai perlu dibenahi dan ditingkatkan. Terutama terhadap segala bentuk bangunan yang tak memiliki IMB.

Politikus PKS itu menyebut keluhan Satpol PP selama ini sudah difasilitasi oleh Dewan dengan harapan ada peningkatan hasil kinerja sebagai aparat penegak peraturan daerah.

"Regulasi yang kurang, disempurnakan, alasan anggaran kurang, kita tambah. Jadi,

kan Kota Yogyakarta bersih, tertib, dan aman.

Sementara untuk pencegahan pelanggaran, lanjutnya, dilakukan dengan mengevaluasi tata ruang dan menyosialisasikan perda rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan perda rencana detail tata ruang (RDTR) kepada masyarakat. Hal itu agar masyarakat serta pemangku wilayah, seperti kecamatan dan kelurahan dapat ikut mengawasi penegakan Perda Bangunan Gedung.

"Prinsipnya, segala pelang-

wongan, Kecamatan Jetis, yang menutup akses jalan sedikitnya sembilan rumah warga.

Itu adalah satu dari sekian kasus pelanggaran izin terutama pembangunan tanpa mengantongi izin mendirikan

kota, selama ini didominasi pada ketidaktegasan dalam pengawasan dan penindakan perda," kata anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti kemarin. **Ke Hal 10**)

sebenarnya apa kendala lemahnya penegakan perda? Jangan sampai jadi polemik dan masyarakat berpikir negatif terhadap pelanggaran yang terkesan dibiarkan," urainya.

Komisi A minta agar Satpol PP mendata ulang pelanggaran IMB untuk secepatnya ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sudah dilantiknya Wali Kota Yogyakarta definitif juga diharapkan memacu kebijakan penegakan perda lebih kuat lagi. Apalagi Wali Kota menjanjikan akan mewujudkan

garan perda harus ditindak. Namun, yang tengah menjadi sorotan adalah IMB, termasuk menara ilegal, properti, harus ada sikap tegas tanpa pandang bulu," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidharatana tidak sependapat jika disebut pengawasan lemah sehingga memicu banyaknya kasus pelanggaran IMB.

Dia mengklaim, selama ini pengawasan telah dilakukan secara optimal dan melalui mekanisme penindakan dari

bangunan (IMB). Meski hanya sebatas pagar tembok, kasus serupa juga pernah terjadi di bantaran Kali Code, Terban, Kecamatan Gondokusuman, awal Maret lalu. Pembangunan pagar tak ber-IMB menambah

hasil patroli Satpol PP, informasi dari dinas terkait, dan aduan masyarakat.

"Sejak Januari 2017 sampai sekarang ada sekitar 100 pelanggaran IMB yang ditindak. Tindakan penyegelan dan penghentian pembangunan juga telah dilakukan," sebutnya.

Meski demikian, Satpol PP menjanjikan akan meningkatkan pengawasan untuk mengurangi serta menindak pelanggaran perda.

**● ristuhanafi**

**- Satpol PP**

Netral  
 Biasa  
 Untuk Diketahui

Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Untuk Dita <input type="checkbox"/> Untuk Diki <input type="checkbox"/> Jumpa Pe

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005